

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Ilmu Hubungan Internasional mempelajari setiap aspek kehidupan manusia dan lingkungannya. Ilmu ini juga mengangkat banyak aspek pembelajaran mengenai hubungan antar dua negara atau lebih. Hubungan Internasional muncul karena kesadaran akan bangsa-bangsa di dunia terhadap keamanan kolektif. Setelah era perang dingin usai, terbentuklah paradigma baru dalam menanggapi ancaman dan kaitannya terhadap praktik keamanan negara, dalam hal ini adalah keamanan non-tradisional yang lebih kompleks atau yang lebih dikenal sebagai kejahatan lintas negara

Secara prinsip, kejahatan transnasional merupakan bentuk kejahatan konvensional yang dilakukan di berbagai negara dan tercakup dalam hukum serta yurisdiksi negara asal dan negara yang terkena dampak. Pada tahun 1974, Cabang Pencegahan Kejahatan dan Kehakiman Pidana Perserikatan Bangsa-Bangsa telah memperkenalkan istilah "kejahatan lintas negara" untuk merujuk pada sejumlah kejahatan yang melibatkan lebih dari satu negara atau memiliki implikasi bagi negara lainnya<sup>1</sup>. Ditahun 1994, PBB secara resmi mendefinisikan kejahatan transnasional sebagai "perilaku yang melanggar hukum, yang pelaksanaannya melibatkan aktor di lebih

---

<sup>1</sup> Mueller, G. O. (2001). Transnational Crime: Definitions and Concepts. In Williams, & P. a. Vlassis (Penyunt.), *Combating Transnational Crime: Activities and Responses* (pp. 13-21). London: Frank Cass Publishers.

dari satu negara, baik secara langsung maupun tidak langsung." Berdasarkan definisi ini, PBB kemudian mengidentifikasi 18 jenis kejahatan transnasional, yang meliputi pencucian uang, perdagangan narkoba ilegal, tindak korupsi dan penyuapan di dalam pemerintahan, peretasan informasi rahasia bisnis yang sah, penipuan yang mengakibatkan kebangkrutan, kejahatan komputer, pencurian hak cipta, perdagangan senjata ilegal, tindak terorisme, pembajakan pesawat, pembajakan di laut, serta pembajakan di jalur darat. Selain itu, ada juga perdagangan manusia, perdagangan organ tubuh manusia, pencurian seni dan artefak budaya, kejahatan terhadap lingkungan, dan berbagai jenis tindak kejahatan lain yang dilakukan oleh kelompok kriminal<sup>2</sup>. Kejahatan transnational dapat dikelompokkan berdasarkan dua sifat yang berbeda. Pertama, dari kejahatan lintas batas adalah yang tidak terlalu terlihat dan sulit untuk diidentifikasi, seperti kejahatan siber dan pencucian uang. Kedua, terdapat jenis kejahatan lintas batas yang tampak jelas dan dapat dikenali dengan mudah, seperti perampokan laut, pengebangan hutan ilegal, penyelundupan dan perdagangan manusia.

Kebanyakan korban dari perdagangan manusia ini ialah anak-anak dan perempuan. Dalam sebuah jurnal yang ditulis oleh Ike Herdiana tentang memahami *Human Trafficking* di Indonesia, mengungkapkan bahwa "Perdagangan manusia didefinisikan sebagai perpindahan manusia (khususnya perempuan dan anak-anak) dengan atau tanpa persetujuan orang yang bersangkutan di dalam suatu negara atau keluar negeri sebagai bentuk perburuan yang eksploitatif, tidak hanya prostitusi dan

---

<sup>2</sup> Transnational Organized Crime in Southeast Asia: Threat Assesment. (2010). *NTS Alert* (1).

perbudakan yang berkedok pernikahan (*serviel marriage*) sehingga memperluas jenis isu kekerasan”<sup>3</sup>.

Di Asia sendiri perdagangan manusia masih marak terjadi, terlebih di negara-negara berkembang. Pada dasarnya banyak negara yang menaruh atensi akan isu ini namun eksistensinya seakan tidak bisa dihindari. Salah satu negara yang masih bergelut untuk mengatasi isu ini ialah Thailand, Thailand merupakan salah satu negara di Asia Tenggara yang menjadi pusat perdagangan manusia. Perdagangan manusia atau *human trafficking* didefinisikan sebagai setiap tindakan yang melibatkan pemindahan, perdagangan atau penjualan manusia baik di dalam maupun antar negara. Umumnya, mekanisme yang digunakan dapat berupa pemaksaan, ancaman, penculikan, dan penipuan<sup>4</sup>. Terjadinya perdagangan manusia di Thailand disebabkan letak geografis Thailand yang berbatasan dengan beberapa negara miskin seperti Laos dan Kamboja, sedangkan perdagangan manusia beroperasi melalui jalur laut dari Bangladesh dan Myanmar yang merupakan jalur strategis bagi perdagangan manusia.

Thailand dipandang sebagai negara kaya oleh para migran, karenanya Thailand merupakan negara tujuan utama di mana sebagian besar migran ini datang untuk mencari kehidupan yang lebih baik<sup>5</sup>. Thailand, sebagai negara asal, transit dan tujuan perdagangan manusia, sebagian besar korbannya adalah perempuan dan anak-anak

---

<sup>3</sup> Ike Herdiana. *Memahami Human Trafficking di Indonesia*. Universitas Airlangga. 2018.

<sup>4</sup> Natarajan, M. *Kejahatan dan Pengadilan internasional*. Yogyakarta. Nusamedia. 2015. hal. 118.

<sup>5</sup> UNODC. *Global Report on Trafficking in Persons 2016*. New York: United Nations Publication. 2016.

yang kemudian dipekerjakan sebagai buruh, diperdagangkan untuk diambil organnya atau diperdagangkan untuk tujuan eksploitasi seksual secara paksa<sup>6</sup>. Sebagian besar korban *human trafficking* di Thailand kembali diperdagangkan ke negara lain, dengan kata lain Thailand hanyalah negara transit bagi korban *human trafficking* yang kemudian diusir dari wilayah Thailand. Korban perdagangan orang yang dipekerjakan di Thailand sebagian besar adalah imigran asing seperti Burma, Kamboja, Laos, Cina, Vietnam, India, termasuk korban etnis minoritas, serta non-warga negara di mana mereka paling berisiko<sup>7</sup>. Negara dengan julukan Gajah Putih dengan jumlah penduduk 69.95 juta jiwa. dirilis oleh kelompok Hak Asasi Walk Free Foundation, Thailand memiliki sebanyak 610.000 korban perbudakan modern pada tahun 2018<sup>8</sup>.

## 1.2 Masalah Penelitian

Thailand sebagai negara tujuan migran terbesar di Asia Tenggara tidak lepas dari isu *Human Trafficking* yang sebagian besar korbannya merupakan perempuan dan anak-anak yang berujung penyelundupan manusia, eksploitasi kerja, hingga eksploitasi seksual secara paksa. Dengan adanya isu *human trafficking* yang masif terjadi di Thailand, UNIAP memberikan edukasi mengenai *human trafficking* melalui dunia pendidikan, mengembangkan perpustakaan yang berisi tentang bacaan mengenai

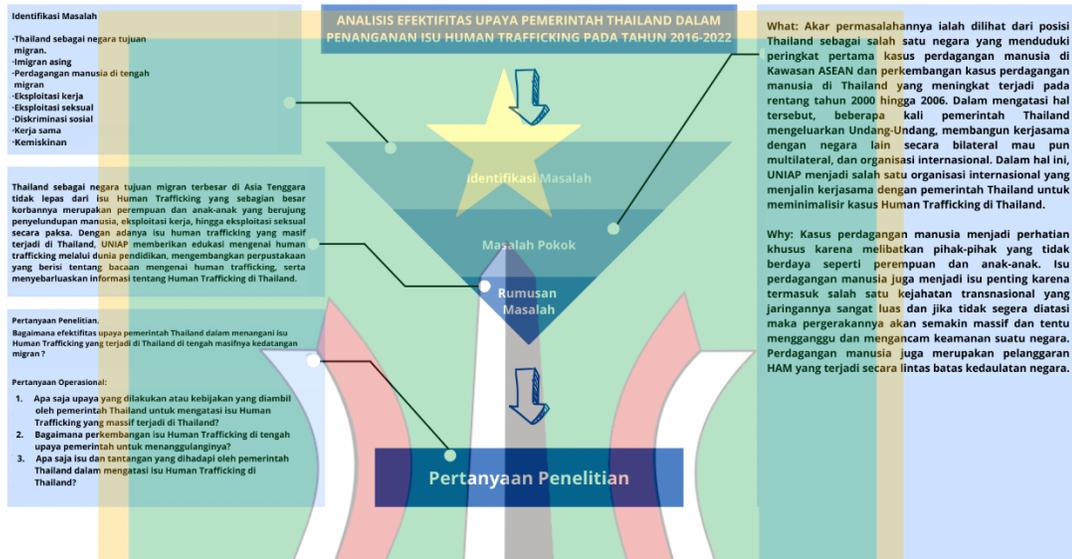
---

<sup>6</sup> Roby, J. L., & Tanner, J. *Supply and Demand: Prostitution and Sexual Trafficking in Northern Thailand*. *Geography Compass*, 3(1), 2009. hal. 89-107.

<sup>7</sup> U.S Department of State. (2015, desember). *Trafficking in Person Report 2015*. Retrieved from <https://www.state.gov/documents/organization/243562.pdf>. 2015. hal. 330.

<sup>8</sup> Web Resmi komunitaa Walk Free Data Slavery Index pada tahun 2018.

*human trafficking*, serta menyebarkan informasi tentang *Human Trafficking* di Thailand.



## Identifikasi Masalah

1. Thailand sebagai negara tujuan migran.

Migran yang berasal dari negara tetangga Thailand memilih negara ini dengan alasan agar dapat memperbaiki keadaan perekonomian mereka. Dengan menuju ke Thailand, para migran berharap agar bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih baik.

2. Imigran asing

Imigran asing yang masuk ke negara Thailand banyak berasal dari negara sekitar seperti Kamboja, Laos, Vietnam, Myanmar.

3. Perdagangan manusia di tengah migran.

Perdagangan manusia di tengah migran terjadi akibat penipuan dan juga akses ilegal ke negara tersebut.

4. Eksploitasi kerja.

Memaksa pekerja untuk bekerja lebih keras atau tidak kenal waktu terjadi di Thailand dan beberapa kasus diantaranya masuk dalam perdagangan manusia.

5. Eksploitasi seksual

Perdagangan wanita dan anak-anak di Thailand banyak yang dijadikan pekerja seks, dari kasus ini juga muncul isu penyakit HIV/AIDS yang mengancam.

6. Diskriminasi sosial

Diskriminasi sosial yang terjadi juga menjadi alasan orang-orang memutuskan untuk mencari pekerjaan yang lebih baik, namun banyak orang yang tidak dibekali dengan pengetahuan tentang perdagangan manusia sehingga terjebak dalam kasus tersebut.

7. Kerja sama

Pemerintah Thailand secara jelas melakukan kerja sama dengan negara-negara regional/kawasan, organisasi internasional, dan juga negara GMS.

8. Kemiskinan

Kemiskinan menjadi akar timbulnya banyak ketimpangan yang selanjutnya menjadi sebab munculnya isu perdagangan manusia di Thailand.

## Masalah Pokok

Apa yang menjadi akar permasalahannya ialah dilihat dari posisi Thailand sebagai salah satu negara yang menduduki peringkat pertama kasus perdagangan manusia di Kawasan Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) dan perkembangan kasus perdagangan manusia di Thailand yang meningkat terjadi pada rentang tahun 2000 hingga 2006. Dalam mengatasi hal tersebut, beberapa kali pemerintah Thailand mengeluarkan Undang-Undang, membangun kerjasama dengan negara lain secara bilateral mau pun multilateral, dan organisasi internasional. Dalam hal ini, UNIAP menjadi salah satu organisasi internasional yang menjalin kerjasama dengan pemerintah Thailand untuk meminimalisir kasus *Human Trafficking* di Thailand.

Mengapa Kasus perdagangan manusia menjadi perhatian khusus, karena melibatkan pihak-pihak yang tidak berdaya seperti perempuan dan anak-anak. Isu perdagangan manusia juga menjadi isu penting karena termasuk salah satu kejahatan transnasional yang jaringannya sangat luas dan jika tidak segera diatasi maka pergerakannya akan semakin massif dan tentu mengganggu dan mengancam keamanan suatu negara. Perdagangan manusia juga merupakan pelanggaran HAM yang terjadi secara lintas batas kedaulatan negara.

## Pertanyaan pokok penelitian

Bagaimana upaya pemerintah Thailand dalam menangani isu *Human Trafficking* yang terjadi di Thailand di tengah massivnya gelombang kedatangan migran ? dan apakah upaya tersebut bisa dikatakan berhasil ?

## Pertanyaan Operasional

1. Apa saja upaya yang dilakukan atau kebijakan yang diambil oleh pemerintah Thailand untuk mengatasi isu *Human Trafficking* yang massif terjadi di Thailand?
2. Bagaimana perkembangan isu *Human Trafficking* di tengah upaya pemerintah untuk menanggulangnya?
3. Apa saja isu dan tantangan yang dihadapi oleh pemerintah Thailand dalam mengatasi isu *Human Trafficking* di Thailand?

## 1.3 Pertanyaan Penelitian

Bagaimana upaya pemerintah Thailand dalam menangani isu *Human Trafficking* yang terjadi di Thailand di tengah masifnya kedatangan migran ?

## 1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis upaya dan tantangan yang dihadapi pemerintah Thailand dalam menangani kasus *Human Trafficking* di Thailand.

Selain itu penelitian ini bertujuan untuk memperkaya kajian Hubungan Internasional khususnya pada isu-isu yang berkenaan dengan *Human Trafficking*.

### **1.5 Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian dari segi akademis adalah agar penelitian ini mampu menambah kajian yang berkaitan dengan isu *human trafficking* di studi Hubungan Internasional. Agar penelitian ini dapat menjadi informasi tambahan bagi para peneliti yang akan meneliti pada isu yang sama. Penelitian ini juga dilakukan dengan maksud agar penulis mampu mengembangkan analisis dalam pengangkatan sebuah isu dalam penelitian.

Dari segi praktis, agar penelitian ini dapat memperkaya kajian ilmu dalam studi Hubungan Internasional khususnya pada isu terkait, dan juga agar penelitian ini bisa menjadi wadah bagi penulis dalam menerapkan teori dan konsep yang relevan seperti yang telah dipelajari selama perkuliahan.

### **1.6 Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah melihat dan mengetahui pembahasan yang ada pada skripsi ini secara menyeluruh, maka perlu dikemukakan sistematika yang merupakan kerangka dan pedoman penulisan skripsi. Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut :

Penyajian laporan skripsi ini menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut :

Bagian awal memuat halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan dosen pembimbing, halaman pengesahan, halaman orisinaloitas dan , halaman kata pengantar, dan abstraksi.

Bagian Utama terbagi atas bab dan sub bab yaitu sebagai berikut :

## BAB I PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah , pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab tinjauan pustaka ini meliputi :

- A. Telaah penelitian yang berisi tentang hasil-hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.
- B. Landasan teori yang berisi tentang pembahasan pengertian dan ruang lingkup teori dan konsep dari Human Security, Kebijakan Pemerintah, Hukum Internasional, dan juga Human Trafficking.

## BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini penulis mengemukakan tentang metode penelitian yang digunakan. Selain itu terdapat juga informasi dari jenis penelitian, teknik pengumpulan data, dan juga teknik pengolahan data.

#### BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini berisi pembahasan isu Human Trafficking yang diangkat oleh penulis. Pembahasan ini disertai dengan data dan informasi posisi Tier I Thailand dalam kurun waktu tahun 2015 hingga 2018.

#### BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dari seluruh penelitian yang telah dilakukan. Kesimpulan dapat dikemukakan masalah yang ada pada penelitian serta hasil dari penyelesaian penelitian yang bersifat analisis obyektif.

Bagian akhir dari skripsi ini berisi tentang daftar pustaka dan daftar lampiran.

